

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut,

1. Langkah langkah pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar
 - a. PPDB di SKH tidak menerapkan jalur zonasi akan tetapi memberlakukan ketentuan daya tampung yakni jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas pada SKh Negeri setiap kekhususan dan satuan pendidikan untuk jenjang TKLB dan SDLB paling banyak 5 (lima) orang peserta didik hal ini sesuai dengan arahan pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
 - b. Penyusunan format RPPH di TKLB terdiri dari tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kekhususan setiap anak, kegiatan pembelajaran dan evaluasi. kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tematik PAUD 2013 ditambah dengan program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian dan indikator pencapaian diturunkan satu tahun dari usia yang seharusnya serta tujuan pembelajaran yang disederhanaka. Penyusunan RPP di SKH Negeri 02 Kota Serang memperhatikan poin-poin kesiapan, ketertarikan dan kebutuhan belajar sedangkan prinsip yang dianut adalah efisien. efektif dan berorientasi pada murid.
 - c. Asessmen pada TKLB dilakukan diawal saat penerimaan peserta didik baru, pada TKLB di SKH tidak terdapat PTS dan PAS, evaluasi dilakukan setiap hari sehingga pada setiap 6 (enam) bulan hanya sekedar pengumpulan data penilaian sehari hari.
2. Hambatan atau kendala dan daya dukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar
Merdeka Belajar akan berjalan dengan efektif jika anak didik berpartisipasi penuh dan ikut serta dalam pemilihan proses kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran maka diantara kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di TKLB diantaranya adalah beberapa rumah murid tidak terdapat jaringan internet, orang tua yang tidak dapat diajak bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran (mengingat anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pendampingan penuh) dan

- kekhususan yang dimiliki oleh setiap anak sehingga dibutuhkan tenaga ahli atau pendamping khusus yang ahli. Diantara daya dukung dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di TKLB diantaranya adalah pemberian kuota internet untuk tenaga pendidik dan peserta didik, pamflet ide-ide kegiatan pembelajaran dari Kemdikbud pusat dan lingkungan sekolah yang luas serta sarana prasarana di SKH yang memadai.
3. Dampak langsung dampak langsung dari pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di SKH adalah 1) terhadap lembaga (ringkasnya administrasi terkait RPP); 2) terhadap pendidik (lebih efisien sehingga waktu pendidik dapat digunakan untuk mengemas kegiatan pembelajaran dengan baik, mengontrol anak lebih sering dan pembuatan evaluasi yang sesuai dengan minat anak); 3) terhadap pihak lain (dengan pengemasan kegiatan pembelajaran dengan baik anak jadi ingin memperhatikan atau antusias meskipun fokusnya sebentar, anak jadi mau mengerjakan evaluasi atau termotivasi karna evaluasi dibuat sesuai dengan keinginan anak, orang tua tidak terlalu bekerja keras dalam mengajak anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan evaluasi).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan rekomendasi pada pihak-pihak terkait dengan pembelajaran pendidikan anak usia dini, sebagai berikut:

1. Bagi Guru Pendidik AUD

Penelitian ini menghasilkan instrumen lembar wawancara dan observasi yang berisikan tentang langkah-langkah, dampak langsung atau jangka pendek dan hambatan atau kendala dan daya dukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar beserta indikatornya yang dapat digunakan oleh guru untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar bagi di sekolahnya.

2. Bagi Lembaga Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar bagi anak usia dini berkebutuhan khusus, yang meliputi langkah-langkah, kendala atau hambatan dan daya dukung serta dampak langsung atau jangka pendek pelaksanaan kebijakan merdeka belajar bagi anak usia dini bekebutuhan khusus.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan untuk penelitian selanjutnya, dengan menjadikan keterbatasan penelitian sebagai bahan evaluasi dan menggunakan instrumen penelitian yang telah disusun untuk memperoleh data yang lebih lengkap terkait pelaksanaan kebijakan merdeka belajar bagi anak usia dini bekebutuhan khusus.